

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai sistem tata negara dengan *Wilayah Al-Faqih* sebagai sistem pemerintahan Islam Iran tidak lepas dari pandangan Imam Khomeini sebagai Pemimpin Revolusi di Negara Iran. Salah satu teori politik dalam pemerintahan Islam dikatakan bahwa “tugas dari pemerintahan Islam adalah mengakhiri semua tradisi eksploitasi yang terjadi secara merata ditengah-tengah masyarakat yang tidak tercerahkan, dan membebaskan orang-orang yang ditindas saudaranya dalam semua aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, dan intelektual.”¹

Dalam pemikiran politik Ayatullah Khomeini (*Wilayah Al-Faqih*) tidak pernah memisahkan antara agama dengan sosial. Ini sangat berbeda dengan kecenderungan para pemikir-pemikir barat yang sekular. “Sesungguhnya wilayah adalah manifestasi manajemen agama.”² *Wali Faqih* bagi beliau adalah seorang individu yang memiliki moralitas (akhlak), patriotisme, pengetahuan, dan kompetensi yang telah diakui oleh rakyat.

Pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap hukum-hukum (syariat) Ilahi menjadi salah satu syarat untuk menjadi pemimpin (*faqih*). Selain syarat tersebut, seorang *faqih* juga harus mampu untuk menegakkan keadilan, dimana

¹Sayid Muhammad Baqir ash-Shadr, *Sistem Politik Islam : Sebuah Pengantar* Jakarta : Lentera, April 2001 hlm. 24.

²Mohdi Hadeiri Tehrani, *Negara Ilahiah: Suatu Teori, Suatu Realitas* Jakarta : Al-Huda, Amman

untuk konteks kekinian, permasalahan keadilan menjadi sesuatu yang hanya selalu ada dalam imajinasi atau khayal belaka.

Kepemimpinan seorang ulama sangat penting dalam persoalan-persoalan duniawi. Hal ini disebabkan karena ulama memahami ajaran-ajaran, hukum-hukum, dan nilai-nilai Islam. Konteks kekinian, banyak sekali terjadi pemisahan antara dunia dengan kehidupan setelah di dunia (akhirat), individu dengan masyarakat, spiritual dengan materialistis. Dengan adanya ulama maka kehidupan sosial akan dijalankan sesuai dengan ajaran-ajaran, dan hukum-hukum yang ada (hukum Ilahi). Perilaku pemerintahan Islam merupakan manifestasi ayat Al-Qur'an ini: Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Maidah: 8)

Teori politik pemerintahan Islam berkaitan pula dengan metode-metodenya yang berjalan di panggung internasional. Pemerintahan Islam tidak mengatakan bahwa "kebijakannya didasarkan pada pertukaran kepentingan, akan tetapi pada kebenaran, keadilan, dan dukungan dari pihak-pihak kurang beruntung yang membentuk dasar kebijakannya."³

Dalam teori *Wilayah Al-faqih* antara agama dengan politik tidak dapat dipisahkan. Islam merupakan agama yang paripurna. Yang tidak melepaskan atau

³ Sa'id Muhammad Basir, *Shada'at*, *Ibid.*, hlm. 29-30

memisahkan hubungan antara aspek duniawi dengan ukhrawi. “Setiap sistem hukum membutuhkan sebuah pemerintahan yang mengadopsinya dan seperangkat aparat negara yang akan mengimplementasikan dan menegakkan sanksinya. Oleh karena itu, hukum islam (syariat) juga membutuhkan sebuah negara untuk penegakan sanksinya.”⁴Tujuan utama dari pendirian Negara dengan Pemerintahan Islam adalah untuk membentuk sebuah masyarakat Islam, di mana sejatinya tidak memandang masyarakat hanya sebagai sekumpulan orang. Tetapi masyarakat juga dilihat dari sisi hubungan sosial dan tertib sosial dimana mereka bertempat tinggal.⁵

Sebelum meletusnya Revolusi Islam Iran, kondisi rakyat atau masyarakat di Iran pada waktu itu sangat memprihatinkan. Pemimpin pada waktu itu, memiliki kedekatan dengan pihak asing, yakni Amerika Serikat. Sehingga sumber daya mineral yang dimiliki oleh Iran yang seharusnya untuk mensejahterakan masyarakat Iran dengan sangat mudahnya dieksploitasi oleh pihak asing dan berakibat pada munculnya kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Iran. Tidak hanya itu, Iran yang kental dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam malah disibukkan dengan ekspansi barat melalui budayanya.

Westernisasi yang terjadi di mana-mana telah meresahkan para kaum ulama. Dimana tidak bersesuaian dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai islam. Ratusan kaum muslim menderita kelaparan dan kehilangan kesempatan untuk menikmati pelayanan kesehatan dan mengenyam pendidikan, sementara sejumlah kecil orang hidup dalam kekayaan dan kekuasaan serta menjalani kehidupan sekehendak hati

⁴Ahmed Yaazi, *Agama Politik : Nalar Politik Islam* Jakarta : Citra, Agustus 2006 hlm. 8

mereka, tak bermoral dan rusak.⁶ Dengan berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh Syah Iran, hanya memberikan bukti bahwasanya dirinya adalah orang yang anti-islam.

Ambisi Shah Iran untuk mempercepat proses modernisasi negaranya, ternyata kemudian menjadi sebab keruntuhan kekuasaannya. Kebijakan yang dijalankan Shah di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya, telah menimbulkan ketidakpuasan di kalangan rakyat banyak.

Dibidang ekonomi, strategi yang mengejar peningkatan GNP (*gross national product*) telah menimbulkan jurang yang semakin dalam, antara yang kaya dan yang miskin, antara kota dan desa, antara sekelompok kecil elit dan penduduk pada umumnya. Di bidang politik, Shah berusaha menghapuskan peranan kaum agama (mullah), dan menggunakan cara-cara represif untuk menumpas lawan politiknya. Di bidang sosial-budaya, Shah berusaha mengurangi pengaruh agama Islam yang telah berakar kuat di kalangan rakyat.⁷

Dengan kondisi yang demikian, sejak maret 1963, Ayatullah Khomeini mengucapkan pidato-pidato dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengecam Syah secara terbuka. Pada tahun 1963, Khomeini menentang kebijaksanaan “Revolusi Putih”, dan setahun kemudian beliau menentang suatu undang-undang yang mengatur kekebalan hukum bagi personil militer AS di Iran. Pada tahun itu juga, Khomeini menentang disetujuinya – oleh majelis – bantuan sejumlah 200 juta dollar AS dari pemerintah Washington.⁸ Hal ini membuat Syah

⁶Imam Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, Jakarta : Pustaka Zahra, Juli 2002, hlm. 40.

⁷M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran; Dari Jatuhnya Syah Hingga Wafatnya Ayatullah*

geram dengan tindakan Khomeini dan akhirnya Khomeini ditangkap oleh polisi dan tentara rahasia Syah setelah selesai menyampaikan salah satu pidatonya di madrasah yang dipimpinnya di kota Qum. Namun hal ini tidak menyurutkan semangat dari Ayatullah Khomeini untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Syah. Berbagai bentuk pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang telah beliau berikan telah membuka pikiran masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan yang terjadi ini.

Selama lima belas tahun, Khomeini memimpin perlawanan terhadap rezim Syah dari tempat pengasingannya (mula-mula di Turki, kemudian di Irak dan terakhir di Perancis). Sementara di dalam negeri, perlawanan terhadap Syah dipimpin oleh tokoh-tokoh agama lainnya, seperti Ayatullah Syariat Madari dan Ayatullah Teleghani.

Pada saat rezim Pahlevi masih memegang tampuk kekuasaan, Iran terfokus terhadap sektor industri. Seperti yang kita ketahui, Iran adalah salah satu negara yang memiliki minyak terbesar di dunia. Sedangkan setelah revolusi terjadi Republik Islam Iran (RII) dibawah pimpinan Khomeini lebih memfokuskan pada sektor pertanian. Ini disebabkan mayoritas masyarakat Iran sebagai petani.

Revolusi Islam Iran ini terjadi setelah Revolusi Perancis pada tahun 1789 dan Revolusi Bolshevik Rusia pada tahun 1917. Iran menamakan Revolusinya sebagai Revolusi Islam. Di mana seorang pemimpin revolusi memiliki latar belakang sebagai ulama atau tokoh agama, yakni Ayatullah Ruhullah Khomeini.

Di tangan Khomeini-lah Islam Syi'ah menjadi suatu kekuatan revolusioner pada

abad 20. Tidak hanya itu, Beliau juga telah mengemukakan tesis dari Karl Marx

dimana Karl Marx mengatakan agama itu adalah candu. Sedangkan di tangan Khomeini, agama tidak dapat dipisahkan dengan urusan-urusan duniawi, seperti sosial, politik, budaya, dan ekonomi.

Revolusi adalah suatu pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang dari suatu daerah atau negara terhadap keadaan yang ada, untuk menciptakan peraturan dan tatanan yang diinginkan. Dengan kata lain, revolusi menyiratkan pemberontakan terhadap keadaan yang menguasai, bertujuan untuk menegakkan keadaan yang lain. Karena itu ada dua penyebab revolusi: Yang pertama adalah ketidakpuasan dan kemarahan terhadap keadaan yang ada, dan yang kedua adalah keinginan akan keadaan yang didambakan.⁹

Terjadinya revolusi bukanlah muncul dalam keadaan yang tiba-tiba atau peristiwa aksidental, melainkan adanya berbagai sebab-sebab yang mengakibatkan revolusi tersebut terjadi. Dalam pengantar buku *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Karl Marx mengatakan dalam tahap-tahap yang jelas dari perkembangan masyarakat, kekuatan produksi material masyarakat berada dalam pertentangan dengan keberadaan hubungan produksi dimana mereka bekerja, dari bentuk-bentuk produksi tersebut hubungan itu berubah menjadi kekangan. Konflik yang terjadi antara kekuatan produksi baru dengan hubungan produksi lama merupakan fondasi ekonomi objektif dari revolusi sosial. Lenin dalam *Selected Work Vol.3* lebih tegas lagi menjelaskan bahwa revolusi tidak akan pernah terjadi manakala tidak didahului oleh kondisi sejarah yang pasti, prasyarat

⁹Murtadha Muthabbari, *Filosof Berpergerakan Islam*, Bandung: Mizan, Januari 1993, hlm. 16

objektif dan subjektif.¹⁰ Hakikat dan sifat dari revolusi ini yaitu, keekonomian dan materiil.

Revolusi tidak hanya berdasarkan ekonomi dan materi, tetapi ada juga pandangan bahwasanya seringkali revolusi berwatak manusiawi semata-mata. Revolusi bisa bersifat manusiawi bila berwatak liberalistik dan politik, dan bukan materialistik. Karena dalam suatu masyarakat, menjaga agar semuanya selalu kenyang dalam batas tertentu ataupun secara menyeluruh menghilangkan kelaparan, merupakan sesuatu yang mungkin, tetapi meniadakan hak kebebasan atau hak menentukan nasib sendiri atau hak untuk mengungkapkan keinginan hati atau hak untuk bebas berpendapat, tidak ada hubungannya dengan faktor-faktor ekonomi. Dalam masyarakat seperti ini tampak bahwa untuk mengembalikan hak-hak yang hilang, orang bangkit dan memberontak, dan dengan cara ini memulai revolusi, yang tidak bersifat ekonomikal, tetapi liberal dan demokratis.¹¹

Selain dua sifat yang disebut diatas, suatu revolusi dapat juga mempunyai esensi ideologikal. Yaitu, bila suatu masyarakat percaya kepada suatu aliran pemikiran, benar-benar merenungkannya, dan percaya bahwa aliran itu berada dalam bahaya dan menjadi suatu sasaran penyerangan yang merusak, mereka menjadi marah terhadap perusakan itu, dan untuk menjaganya agar tetap sempurna, mereka melakukan pemberontakan. Bagi orang-orang ini, revolusi tidak ada hubungannya dengan perut kenyang atau lapar, atau kebebasan politik, karena mereka mendapatkan kebebasan politik, dan perut mereka pun kenyang. Tetapi karena

¹⁰Noor Arif Maulana, *Revolusi Islam Iran : Dan Realisasi Wilayah Al-Faqih*, Yogyakarta : Kreasi Wacana, Desember 2003, hlm. ix.

¹¹Murtadha Muthahhari, *Op. Cit.*, hlm 17.

mereka melihat aliran pemikiran mereka tidak dihormati, mereka bangkit dan memberontak.¹² Inilah yang menjadikan Revolusi di Iran terjadi.

Ayatullah Khomeini telah berhasil menggulingkan atau meruntuhkan kekuasaan Syah Reza Pahlevi dengan sebuah Revolusi yang mencengangkan dunia internasional. Dengan adanya revolusi tersebut, Iran telah mengubah bentuk pemerintahannya, dimana pra-revolusi Iran (pada saat Rezim/Dinasti Syah) adalah negara yang menggunakan sistem pemerintahan Monarki sedangkan pasca revolusi, Iran mengganti sistem pemerintahan yang monarki menjadi sistem pemerintahan yang diberi nama Republik Islam Iran dan dapat bertahan hingga saat ini.

Walaupun Imam Khomeini tidak dikenal sebagai teoritikus dalam bidang filsafat politik, namun Imam Khomeini mampu mengembangkan dan mempraktikkan gagasan pemerintahan Islam di dunia modern. Dari sekian banyak buku-buku beliau, hanya ada dua karya Imam Khomeini yang membahas teori politik *pertama*, *Kasyf al-Asrar* dalam buku ini Imam Khomeini menganggap Rezim Reza Syah ini tidak hanya diktator, tetapi juga berusaha melenyapkan Islam sebagai suatu kekuatan sosial politik di seluruh dunia. Imam Khomeini secara keras menyerang para Imprealis dan para agen-agennya, seperti Reza Khan dan Mustafa Kamal Attaturk, dan rencana-rencana mereka untuk menjatuhkan atau melenyapkan Islam. Bagi Imam Khomeini, para penguasa ini adalah musuh nyata umat Islam. Kerena itu mereka harus dilawan, agar tidak merusak tatanan masyarakat Islam. Karya *kedua* *Hukumat-e Islami Wilayat-e Faqih* (Pemerintahan

¹²Murtadha Muthabbari, *Op. Cit.* hlm 17-18

Islam), buku ini merupakan sebuah kompilasi dari sekitar dua belas kuliah Imam Khomeini di Najaf, yang bertema *Wilayat al-Faqih*. Ada tiga hal yang penting dalam buku ini yaitu pertama, “kebutuhan terhadap pembentukan dan pemeliharaan Institusi Politik Islam yaitu terwujudnya kekuatan politik sesuai dengan tujuan, atauran, dan kriteri-kriteria Islam. Kedua, tugas bagi para Fukaha (Ulama) untuk membentuk Negara Islam (Pemerintahan Islam), dan mereka mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Yaitu, Pemerintahan Islam yang dipimpin dan dikepalai oleh seorang *faqih* (Ulama). Ketiga program kerja yang disusun oleh Imam Khomeini untuk membentuk sebuah Negara Islam”¹³. Buku ini merupakan puncak dari pemikiran Imam Khomeini tentang *Wilayatul Faqih* dan merupakan teks book yang menjadi acuan tentang *Wilayatul Fakih* secara teori.

Teori *Wilayatul Faqih* ini (pemerintahan kaum ulama) menjadi bagian terpenting dalam sistem Republik Islam Iran. Lebih jauh menganalisis struktur pemerintahan Republik Islam Iran ini merupakan perwujudan dari pemikiran politik Ayatullah Ruhullah Khomeini. Pemikiran Imam Khomeini tentang negara yang berbentuk Republik Islam, mendapat legitimasi formal setelah diadakan referendum (30-31 maret 1979 M) untuk mendapatkan legitimasi formal republik Islam dan mayoritas menyetujuinya sebagaimana dalam Konstitusi Republik Islam Iran sebagai berikut :

¹³Ustadz Taha Rafiqul Jami dan Imam Khomeini, *Wilayatul Faqih dan Demokrasi Islam*, Al-Huda

B. Rumusan Masalah

Setelah mencermati penjelasan di atas, makapokok permasalahan yang akan dibahas ialah sebagai berikut: Bagaimanakah teori dan praktiknya sistem pemerintahan *Wilayatul Faqih*di Negara Iran?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memperoleh pengetahuan secara teoritis mengenai bentuk pemerintahan *Wilayatul Faqih* dan praktiknya dalam konstitusi Republik Islam Iran, serta memahami kedudukannya seperti apa, pertanggung jawabannya kepada siapa dan bagaimana hubungan pemerintahan dengan lembaga-lembaga lainnya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum tata negara.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengambilan keputusan politik ketatanegaraan di Indonesia guna kebaikan masyarakat dan negara Indonesia ke depannya.